

Pangkostrad Sematkan Brevet Cakra kepada 500 Prajurit Kostrad

JAKARTA (IM) - Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak secara resmi menuntun Latihan Standardisasi Prajurit Kostrad Gelombang XII TA. 2022 dan menyematkan Brevet Cakra kepada 500 Prajurit Kostrad.

Mereka terdiri dari 46 Perwira 92 Bintara dan 362 Tamtama. Penyerahan bertempat di Pantai Palampang, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (15/3).

“Selamat datang dan selamat bergabung sebagai prajurit Kostrad. Kegiatan penutupan Latihan Standardisasi Prajurit Kostrad Gelombang XII TA. 2022 dan tradisi penyerahan Brevet Cakra hari ini sebagai bentuk penerimaan serta pengukuhan para Perwira, Bintara dan Tamtama menjadi bagian dari keluarga besar Kostrad. Selamat bertugas semoga sukses,” ucap Pangkostrad.

Dalam sambutannya, Pangkostrad mengatakan bahwa satuan Kostrad sebagai satuan tempur memiliki standar yang harus disiplin, untuk mengantisipasi dan menghadapi berbagai perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang di seluruh wilayah NKRI.

Latihan standardisasi prajurit Kostrad bertujuan untuk membentuk prajurit-prajurit Kostrad untuk memiliki sikap disiplin tinggi dan mampu

nyai fisik yang prima, serta menanamkan kebanggaan dan kecintaan terhadap satuan, sebagai wahana untuk memupuk jiwa korsa dan kebersamaan, dengan menyiapkan kemampuan yang handal untuk melaksanakan segala macam bentuk tugas, baik dalam negeri maupun luar negeri.

“Prajurit Kostrad harus selalu siap dan mampu melaksanakan tugas operasi dalam segala bentuk, medan dan cuaca, serta siap digerakkan untuk melaksanakan tugas kapanpun dan dimanapun, baik dalam rangka operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang,” ujarnya.

“Setiap prajurit Kostrad harus memiliki kualitas kemampuan dan militansi yang dilandasi tekad untuk dapat mewujudkan profesionalisme sebagai prajurit Kostrad yang berdedikasi tinggi dan dicintai rakyat,” tambahnya.

“Dengan berakhirnya latihan ini, saya menghimbau kepada seluruh prajurit agar selalu menjaga kehormatan, harga diri dan kebanggaan sebagai prajurit Kostrad,” ujar Pangkostrad.

Acara diakhiri dengan demotransi dan bela diri ini dihadiri para pejabat Kostrad, Bupati Sukabumi, Forkopimda Kabupaten Sukabumi, Forkopimcam Kecamatan Ciemas, para Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. ● han

2 Polhukam

FOTO/ANT



RAPAT KERJA KOMISI X DPR DENGAN MENPAREKRAF

Menparekraf Sandiaga Uno (kiri) berbincang dengan pimpinan Komisi X DPR Syaiful Huda (kanan) sebelum dimulainya rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/3). Rapat tersebut membahas kesiapan dukungan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2022, strategi pemulihan dan penguatan parekraf setelah mulai melandainya pandemi COVID-19 (syarat perjalanan tanpa tes usap), serta keputusan Raker/RDP dan Panja yang belum ditindaklanjuti.

Dua Menko Beda Suara soal Penundaan Pemilu, Jokowi Perlu Sampaikan Sikap Final Pemerintah

Dalam sebuah wawancara yang diunggah di akun Youtube Deddy Corbuzier, Luhut menyatakan memiliki big data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda. Namun banyak pihak yang meragukan data tersebut.

Pemilu 2024.

“Karena Pak Luhut sudah berbicara dalam narasi yang berbeda, tentunya atasan dari dua orang ini adalah presiden sehingga kemudian kata akhirnya, sikap akhir pemerintah itu ada di presiden,” kata Ali saat dihubungi wartawan, Rabu (16/3).

Ali mengatakan, sikap final yang disampaikan Jokowi kelak diharapkan dapat mengakhiri gonjang ganjing di tengah masyarakat mengenai wacana menunda pemilu. Sebab, kata Ali, masih banyak agenda pemerintah yang mesti diselesaikan Jokowi dalam sisa masa jabatannya dengan kepercayaan penuh dari publik.

“Kepercayaan masyarakat harus ditumbuhkan kembali, tapi kalau seperti ini kan akan membuat polarisasi yang pada akhirnya membuat masyarakat

tidak percaya terhadap pemerintah,” katanya.

Ali menambahkan, perbedaan sikap antara Luhut dan Mahfud juga semakin menegaskan anggapan masyarakat bahwa Luhut merupakan ‘menteri segala urusan’. Sebab, persoalan pemilu sejatinya merupakan isu yang menjadi ranah Mahfud sebagai Menko Polhukam.

“Selama ini kan desas desusnya seperti itu, memang Pak Luhut menjadi sangat powerful di pemerintahan. Hari ini menegaskan kembali, jadi urusan ini kan tupoksi daripada Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam mengkoordinasikan tentang pemilu,” ujar Ali.

Dalam sebuah wawancara yang diunggah di akun Youtube Deddy Corbuzier, Luhut menyatakan memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang

ingin Pemilu 2024 ditunda.

Luhut mengklaim, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.

Sementara itu, Mahfud menyatakan, pemerintah tidak pernah membahas rencana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Di tubuh pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden/wapres baik itu menjadi tiga periode maupun untuk memperpanjang satu atau dua tahun,” kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Senin (7/3) lalu.

Di sisi lain, Presiden Jokowi pada Jumat (4/3), menegaskan bahwa dirinya taat pada konstitusi. ● han

RALAT PENGUMUMAN

Sehubungan dengan terdapatnya kekeliruan dalam PENGUMUMAN yang telah dimuat dalam surat kabar ini, yaitu INTERNATIONAL MEDIA pada tanggal 24 Februari 2022 halaman 4, maka dengan ini melakukan ralat, sehingga untuk selanjutnya isi PENGUMUMAN tersebut berbunyi sebagai berikut:

Direksi PT TIGA BERUANG KALIFORNIA, dengan ini mengumumkan bahwa PT TIGA BERUANG KALIFORNIA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“Perseroan”), bermaksud untuk melakukan pengambilalihan sebagian besar saham PT REMA LOGISTIK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Utara secara langsung dari para pemegang saham PT REMA LOGISTIK INDONESIA.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan ingin memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pengambilalihan saham tersebut dapat menyampaikannya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat Garuda 6, Lantai 27D, Jl. Sultan Iskandar Muda No. 10, Jakarta Selatan Up. Andree.

Demikian pengumuman ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (7) dan Pasal 127 ayat (2) dan (8) dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Demikian Ralat ini dibuat.

Jakarta, 17 Maret 2022 -
Direksi Perseroan.

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 40 pasal 127 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT Kainonia Trans Nusa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Pluit, Jakarta Utara (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan berencana untuk mengalihkan sebagian besar sahamnya yang mengakibatkan perubahan pendendalian dalam perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka setiap pihak yang keberatan atas rencana Pengalihan Saham dapat menghubungi Direksi Perseroan Terbatas disertai dengan bukti yang sah paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman ini ke alamat: Jl. Pluit Sakti Raya No. 101 Kav A8 Pluit- Penjaringan, Jakarta Utara 14450.

Jakarta, 17 Maret 2022
Direksi Perseroan

DPRKP Banten Rekrut Pegawai Untuk Pendukung BIS

SUMBER FOTO: INSTAGRAM/@STADION.BANTEN



SERANG (IM) - Jelang selesainya pembangunan Banten Internasional Stadium (BIS), Pemerintah Provinsi Banten, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten mulai melakukan rekrutmen tenaga pendukung untuk operasional Stadion yang berada di Kecamatan Curug, Kota Serang ini. Terdapat tujuh posisi yang bakal diisi dalam rekrutmen tersebut, yakni tenaga pengelola masjid, teknik bangunan, tenaga teknik elektrik, tenaga teknik mesin, tenaga kebersihan dan tenaga keamanan.

Disampaikan, M. Rachmat Rogianto Kepala DPRKP Banten, untuk beberapa posisi, diperlukan persyaratan spesifik. Seperti untuk pengelola masjid, kata dia, pelamar diwajibkan hafal juz 30 Al-Qur'an. “Begitupun dengan tenaga keamanan dan kebersihan, harus memiliki fisik yang bugar dan lolos tes yang melibatkan pihak

TNI/Polri dan Satpol PP,” jelasnya.

Diungkapkan Rachmat, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh calon pegawai di BIS setelah lolos proses kelengkapan administrasi, yaitu tes kompetensi, interview dan tes tertulis secara *on line*, yang link-nya dikirim ke pelamar. Setelah mereka melalui tahapan-tahapan tersebut, kata dia, baru akan ditentukan apakah yang bersangkutan dapat diterima atau tidak. “Pengumuman penerimaan akan kami umumkan di akun media sosial resmi dinas,” ungkapnya.

Terkait jadwal peresmian BIS, yang rencananya akan dilakukan pada 26 Maret mendatang, Rachmat mengungkapkan akan dijadwalkan ulang. Menurutnya, keputusan tersebut diambil mengingat ada sejumlah proses yang harus dilalui sebelum dapat dipergunakan.

“Ada beberapa kendala terkait prosesnya, yang jelas bukan karena bangun-

annya. Jadi kemungkinan tidak di bulan (Maret) ini,” ucapnya, di Gedung DPRD Banten, Selasa (8/3).

Dijelaskannya, untuk pembangunannya BIS sendiri, saat ini telah mencapai 97 persen. Namun untuk pengelolannya, kata dia, harus melalui tahap lelang, yang tentunya membutuhkan waktu.

“Jadi bukan dibatalkan, tapi lebih ke penentuan waktunya saja sih. Karena lelang itu kan butuh proses,” ucapnya.

Kedepannya, kata Rachmat, untuk memenuhi ketersediaan anggaran operasional maupun pengembangan BIS, Pemprov Banten akan mengadakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Saat ini, kata dia, pihaknya sedang menyusun terkait perencanaan dari kerjasama tersebut.

“Dengan badan usaha mananya, belum bisa kita tentukan. Nanti ada proses dan tahapan-tahapan lainnya terkait kerjasama ini, pungkasanya. ● Adv

Presiden Belum Jadwalkan Pelantikan 7 Anggota KPU dan 5 Anggota Bawaslu

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menjadwalkan pelantikan 7 Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 5 Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih.

Menurut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, sejauh ini memang belum ada agenda Presiden Jokowi untuk melantik para penyelenggara pemilu terpilih tersebut. “Belum ada jadwal pelantikan,” ujar Heru saat dikonfirmasi, Rabu (16/3).

Heru menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan kapan

diagendakan adanya pelantikan Presiden Jokowi.

Pelantikan anggota KPU dan Bawaslu menjadi bahan pembincangan di tengah isu adanya penundaan pemilu 2024. Bahkan, setelah resmi disahkan DPR, para penyelenggara pemilu tersebut telah bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang pernah menggagas ide penundaan pemilu.

Diketahui, DPR RI mengesahkan 7 Anggota KPU dan 5 Anggota Bawaslu terpilih. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR ke-16 tahun persidangan III

tahun 2021-2022 pada Jumat 18 Februari 2022.

Berdasarkan hasil musyawarah mufakat, kata Doli, Komisi II menetapkan;

Sebanyak 7 Anggota KPU terpilih yakni: Betty Epsilon Idrosos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Dan 5 Calon Anggota Bawaslu terpilih periode 2022-2027: Lolly Suhenty Puadi, Rahmad Bagja, Totok Haryono, dan Herwyn Jelfer H Malonda. ● mei

Namanya Dikaitkan dengan Kelompok Teroris HASI, Ini Penjelasan Fadli Zon

JAKARTA (IM) - Anggota DPR RI Fadli Zon klarifikasi terkait adanya pihak-pihak yang menghubungkan dirinya dengan organisasi Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI), yayasan terafiliasi dengan Jamaah Islamiah.

Tersangka terorisme dokter Sunardi yang Ditembak Densus 88 pada 9 Maret 2022 lalu diketahui merupakan salah satu penanggung jawab Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI).

“Saya mengikuti beberapa berita, yang dimulai dari cuitan seorang buzzer, yang isinya mengaitkan seolah-olah saya punya kaitan dengan seorang terduga teroris yang baru saja ditangkap Densus 88, hanya karena sebuah foto lama tahun 2015,” ujar Fadli Zon, Rabu (16/3).

Foto pada 2015 tersebut menampilkan Fadli Zon sedang menyerahkan bantuan terhadap krisis kemanusiaan Suriah yang kemudian diunggah akun Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI).

Ia menjelaskan sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Korpolkam, 2014-2019), setiap hari saya menerima berbagai delegasi bahkan hingga puluhan orang.

Delegasi masyarakat yang ia terima mewakili berbagai spektrum golongan dan kepentingan, baik untuk keperluan audiensi, penerimaan pengaduan, maupun *courtesy call*.

“Sebagai wakil rakyat, saya selalu bersikap terbuka terhadap seluruh anggota masyarakat, apapun suku, ras, agama, serta afiliasi politiknya. Itu adalah bagian dari tugas representasi saya sebagai anggota DPR RI,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.

Pada 28 Mei 2015, dirinya

bersama Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah, menerima permintaan delegasi kemanusiaan dari Forum Indonesia Peduli Syam (FIPS) yang dipimpin oleh Ustadz Bachtiar Nasir (UBN).

“Mereka menyampaikan perkembangan situasi pengungsi Suriah di perbatasan Turki yang membutuhkan bantuan dari masyarakat Indonesia. Mereka menggalang dana untuk rumah sakit darurat, makanan, serta pakaian bagi pengungsi korban perang,” tuturnya.

Karena dana dikumpulkan dari masyarakat Indonesia, mereka kemudian meminta Fadli Zon dan Fahri Hamzah sebagai representasi pimpinan wakil rakyat untuk secara simbolik menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut kepada FIPS.

“Penyerahan bantuan simbolik ini diabdikan oleh para wartawan yang hadir. Semua dana yang tertera dalam simbol (USD 20,000) adalah dana yang dikumpulkan oleh FIPS dari masyarakat Indonesia, bukan sumbangan pribadi saya atau Fahri Hamzah,” terang Fadli Zon.

Fadli Zon dan Fahri Hamzah mengenal tiga anggota delegasi FIPS, yaitu Ustadz Bachtiar Nasir, Mustofa Nabra, serta pengacara Achmad Michdan. Namun, empat orang lainnya Fadli Zon mengaku tidak mengenalnya. Sebelum bertemu ke DPR, pada tanggal 21 Mei 2015 FIPS disebutkan Fadli Zon juga telah bertemu ke Kementerian Luar Negeri yang diterima oleh Wakil Menteri Luar Negeri terkait bantuan kemanusiaan bagi rakyat Suriah yang saat itu sangat membutuhkan pertolongan kemanusiaan.

“Upaya untuk mengait-ngaitkan dengan terduga teroris adalah

fitnah belaka. Secara politik, saya menganggap ini adalah fitnah yang kotor. Penjelasan ini saya buat untuk menepis fitnah sejumlah beresusaha memutarbalikkan dukungan saya terhadap aksi kemanusiaan seolah adalah bentuk dukungan terhadap terorisme. Itu fitnah yang sangat kotor dan keji sekali,” kata Fadli Zon.

Ia memberi analogi saat Presiden Joko Widodo pernah menerima terduga teroris Farid Okbah di Istana pada 29 Juni 2020.

“Pada tanggal 16 November 2021, Farid Okbah ditangkap oleh Densus 88 sebagai terduga teroris. Apakah kemudian dua hal tersebut dapat dikaitkan,” tutup Fadli Zon.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, dr Sunardi tewas ditembak Densus 88 dalam penyerangan yang dilakukan di Jalan Bekonang-Sukoharjo, Rabu (9/3) malam.

Sunardi dilumpuhkan dengan cara ditembak karena hendak melawan saat akan ditangkap dan menabrakkan mobilnya ke mobil petugas maupun kendaraan warga yang melintas. Dokter Sunardi merupakan anggota Jamaah Islamiyah (JI) dan menjabat sebagai Amir Khidmat JI, Deputi Dakwah dan Informasi, penasihat Amir JI, dan penanggung jawab Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI).

Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan pada Jumat (11/3) Hilal Ahmar Society adalah sebuah yayasan atau organisasi terlarang yang terafiliasi dengan jaringan organisasi terorisme JI. Tugas dari HASI adalah merekrut, mendanai, dan memfasilitasi perjalanan pengikut FTF (foreign terrorist fighter) ke Suriah. ● mei